Borneo Tribune

Selasa, 14 Desember 2010

FOTO Bagus K./Borneo Tribune

Adi Sudibyo

Adi Sudibyo Pimpin BPK Kalbar

Bagus Kosminto
Borneo Tribune, *Pontianak*

Berdasarkan keputusan Sekretaris Jendaral (Sekjen) BPK RI Nomor 314/K/X-X.3/12/ 2010 tertanggal 3 Desember 2010, BPK RI menetapkan, Adi Sudibyo, sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) RI Wilayah Kalbar, menggantikan Mujiono, yang berakhir masa

....Ke Halaman - 2

Adi Sudibyo Pimpin BPK Kalbar

jabatannya pada Oktober lalu. Sesuai SK Sekjen BPK RI, tentang perihal pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan strukturan Eselon II pada pelasksaan BPK.

Serah terima jabatan (Sertijab) berlansung di gedung BPK RI Wilayah Kalbar, Jalan A Yani Pontianak, Senin (13/12). Hadir pula Gubernur Kalbar, Cornelis, sejumlah Bupati dan Ketua DPRD dari 14 kabupaten/kota, jajaran SKPD Pemrov Kalbar.

Anggota VI BPK RI Rizal Jalil mengatakan, "Semenjak berdirinya BPK RI Wilayah Kalbar, kepemimpinan Mujiono telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuagan yang baik, kedepan saya harap Adi Sudibyo sesuai dengan keahliannya mampu meningkatkan ketelitian tata pengelolan keuagan daerah," kata Rizal.

Sebelumnya Adi Sudibyo, menempati posisi sebagai kepala Sub Auditorat IV.A.1 yang membawahi Depertemen Pekerjaan Umum. Sehingga, BPK RI menganggap ia cocok di tempatkan di wilayah Kalbar, yang saat ini sedang membangun sarana infrastruktur dari berbagai bidang sebagai upaya peningkatkan roda perekonomian rakyat secara merata.

Rizal Jalil menjelaskan dimasa kepemimpinan Mujiono lima tahun terahir, telah memperbaikai tata kelola keuagan daerah di Kalbar. Namun ada berbagai hal yang belum dilaksanakan dengan baik, terutama untuk daerah kabupaten baru. Terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah yang perlu terus ditingkatkan kesempurnaannya.

Selain itu, kata Rizal, terkait dengan penyajian informasi keuagan pemerintah daerah yang di buat dalam laporan keuagan daerah, haruslah dicermati pemerintah daerah dalam dalam menyajikan nilai selisih lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalm laporan keuangan.

"Kami akan memantau perkembangan perbaikan keuangan daerah," kata Rizal.

Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan BPK RI khususnya Wiilayah Kalbar terpenting dalam pengurusan keuangan daerah. "Semenjak BPK berdiri pada tahun 2006, banyak manfaat bagi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov Kalbar," kata Gubernur. □